

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA**

2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga naskah akademik Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari harapan dan keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta untuk mengembangkan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat.

Dengan tersusunnya naskah akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak khususnya Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa ini.

Grobogan,                  Juni 2023

TIM PENYUSUN

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i	
Kata Pengantar .....	ii	
Daftar Isi .....	iii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang .....	1	
B. Identifikasi Masalah .....	8	
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8	
D. Metode Penelitian .....	9	
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK</b>		
A. Kajian Teoritis .....	10	
B. Kajian Asas/Prinsip .....	22	
C. Kajian Praktik .....	32	
D. Kajian Implikasi Penerapan .....	38	
<b>BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>		41
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS</b>		
A. Landasan Filosofis .....	67	
B. Landasan Sosiologis .....	70	
C. Landasan Yuridis .....	73	
<b>BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG</b>		
A. Sasaran .....	78	
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	78	
C. Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang .....	78	
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
A. Kesimpulan .....	86	
B. Saran .....	88	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	89	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang yang merupakan pelaksanaan ketentuan tersebut, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Mencermati semangat Undang-Undang tersebut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka sesungguhnya sistem pemerintahan di Indonesia dilihat dari struktur penyelenggaranya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: *central government* (pemerintah pusat); *local government* (pemerintahan daerah) yang meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan daerah kota; dan *rural government* (pemerintahan desa).

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan

“*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Selanjutnya Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah<sup>1</sup>:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan,
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia ada sejumlah 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa.

Dalam upaya peningkatan perekonomian desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian desa dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, memberikan panduan kepada seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUMDes dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

Selain dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa

adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa<sup>2</sup>.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Dalam riset ini, keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian desa dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah melakukan peningkatan kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar-Desa. Dalam rangka pembinaan Pemerintahan Desa di bidang peningkatan kapasitas BUMDes agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi Desa di Daerah melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka perlu Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa; usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dipandang perlu adanya Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian

masyarakat di pedesaan Pemerintah Kabupaten Grobogan memandang perlu mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Daerah.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Perubahan tatanan hukum tentang desa serta penataan Badan Usaha Milik Desa yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Grobogan merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap konflik, maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang sejahtera melalui pengaturan hukum terhadap Badan Usaha Milik Desa.

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Kabupaten Grobogan, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tentang Badan Usaha Milik Desa?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Badan Usaha Milik Desa?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Badan Usaha Milik Desa?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik meliputi:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Badan Usaha Milik Desa.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Badan Usaha Milik Desa.

#### Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Grobogan sebagai bahan pendukung proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Prioritas Tahunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistematis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh Tim penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah dan pejabat fungsional perancang perundang-undangan (*legal drafter*).

Penyusunan naskah akademik tentang Badan Usaha Milik Desa ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari Kabupaten Grobogan, tetapi juga dari Daerah lain.

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang badan usaha milik desa akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan maupun pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

##### 1. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.<sup>3</sup>

Desa merupakan kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lalu merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri, bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Erni Irawati, Jurnal Inovasi Penelitian Volume 2 Nomor 2 Juli Tahun 2021, *Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa) Hal 1.

<sup>4</sup> Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm. 8.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Milik Desa, maupun peraturan pelaksana lainnya telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>5</sup> Desa diharapkan menjadi pilar utama bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selain itu, ditetapkannya pengaturan tentang Desa dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>5</sup> M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta:2015, hlm. 8.

<sup>6</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm. 16

Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.<sup>7</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset atau sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Kendatipun demikian, desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan

---

<sup>7</sup> Baharudin, *Pengertian Desa*, JurnalDesa.id dalam <https://jurnalDesa.id/pengertian-desa/>

kesejahteraan masyarakat desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib di swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu men swakelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan.

## 2. Badan Usaha

Mengenai pengertian badan usaha, Chidir Ali mengutip apa yang disampaikan oleh A. Ridwan Halim, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu<sup>8</sup>:

Tabel 1. Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha

No	Perusahaan	Badan Usaha
1	Perusahaan adalah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2	Perusahaan menghasilkan barang & jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya
3	Suatu perusahaan tidak selalu	Suatu badan usaha pastilah

<sup>8</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development, Volume V No. 1 Februari 2014. Hal 3.

	<p>pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).</p>	<p>merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.</p>
4	<p>Secara konkret perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.</p>	<p>Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, misalnya: Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.</p>

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas<sup>9</sup>:

- a. Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan
- b. Badan usaha yang bukan badan hukum.

---

<sup>9</sup> Ibid Hal 4.

Tabel 2. Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan yang Bukan Badan Hukum

No	Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum
1	Yang menjadi subjek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.	Yang menjadi subjek hukum disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum
2	Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/ anggotanya tetap bebas dari sitaan)	Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.
3	<p>Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT (Perseroan Terbatas)</li> <li>- PN (Perusahaan Negara)</li> <li>- PD (Perusahaan Daerah)</li> <li>- Koperasi</li> <li>- Perum (Perusahaan Umum)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjan (Perusahaan Jawatan)</li> <li>- Persero (Perusahaan Sero)</li> <li>- Yayasan dan sebagainya.</li> </ul>	
--	---	--

Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum yaitu *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), serta *legal persons* (Inggris). Meskipun demikian dari kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum (Oetarid Sadino), awak hukum (St.K. Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya.<sup>10</sup> Lain daripada itu, istilah *rechtspersoon* merupakan lawan kata dari *natuurlijk persoon* (manusia). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata (KUHPerdata) tidak dijumpai istilah *recht persoon* maupun badan hukum, juga tidak terdapat peraturan umum yang mengatur mengenai *rechtspersoon* maupun badan hukum secara lengkap.

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*recht persoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.<sup>11</sup> Lebih jauh menurut Logemann, bahwa badan hukum adalah suatu *personifikatie* (personifikasi) yaitu suatu *bestendig haid* (perwujudan, penjelmaan) hak dan kewajiban. Hukum organisasi (*organisatierecht*) menentukan *innerlijkstruktuur* (struktur intern) dari *personifikatie* itu. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetap ada, diteruskan, sedangkan pengurusnya, yang menjadi wakil kontinuitas itu, dapat berganti-ganti.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Chidir Ali, Op.Cit., h: 18.

<sup>11</sup> Chidir Ali, Op.Cit., h: 14.

<sup>12</sup> Chidir Ali, Op.Cit., h: 18-19.

Berbeda dengan pendapat diatas, Bothlingk tidak melihat realitas sebagai dasar hukum. Bagi Bothlingk, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.<sup>13</sup> H. Th. Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menerangkan bahwa purusa wajar yakni manusia adalah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu adalah purusa hukum atau badan hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai hak milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.<sup>14</sup>

Menurut Subekti, badan hukum atau *rechtspersoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum.<sup>15</sup> R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*recht persoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>16</sup> Chidir Ali sendiri mengemukakan bahwa mengenai apakah badan hukum itu jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban apa subjek hukum yang pengertian pokoknya terumus, yaitu: (1) manusia, dan (2) segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada rumusan yang ke (2) atau terakhir inilah merupakan jawaban apa badan hukum itu.<sup>17</sup>

Beberapa ahli hukum berikut ini juga mengemukakan hal yang sama sebagaimana disampaikan oleh Chidir Ali tersebut di atas, antara lain:

---

<sup>13</sup> Chidir Ali, Op.Cit., h: 19.

<sup>14</sup> Chidir Ali, Op.Cit., h: 19-20.

<sup>15</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985, h: 21.

<sup>16</sup> Chidir Ali, Badan Hukum., Loc. Cit. Sebagaimana dikutip dari Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Eresco, Jakarta, Bandung, 1979, Hal. 171.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 171.

- a. Sri Soedewi Masjchun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.<sup>18</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>19</sup>
- c. Sudiman Kartohadiprodo menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (*natuurlijke persoon*). Sebagai lawan subjek hukum lainnya, adalah badan hukum (*recht persoon*).<sup>20</sup>
- d. Marhainis Abdul Hay menerangkan bahwa orang (*persoon*) sebagai subjek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:
  - 1) *Natuurlijke persoon* atau *mens person* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi; dan
  - 2) *Rechtspersoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.<sup>21</sup>

Melengkapi apa yang disampaikan dari para ahli hukum sebelumnya, maka apa yang disampaikan oleh Purnadi Purbacaraka

---

<sup>18</sup> Ibid. Sebagaimana dikutip dari Sri Soedewi. M. Sofwan. Hukum Badan Pribadi. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, stencil tanpa tahun.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bale Bandung – Sumur Bandung. 1987. hal: 23.

<sup>20</sup> Chidir Ali, Badan Hukum. Loc. Cit

<sup>21</sup> Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perdata Materiil – Jilid I*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982. h: 28.

dan Agus Brotosusilo juga perlu dipahami, dimana keduanya memberikan pengertian tentang pribadi hukum sebagai suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.<sup>22</sup> Dari pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka penulis kemudian menyimpulkan bahwa pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkumpulan orang (organisasi);
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para pendirinya dan/atau anggota-anggotanya;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban;
- f. Dapat bertindak sebagai salah satu pihak (penggugat atau tergugat) di depan pengadilan.

### **3. Badan Hukum Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama**

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUM Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau

---

<sup>22</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*. Loc. Cit. Sebagaimana dikutip dari Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, Hal 43.

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUMDes yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mencabut BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa BUM Desa terdiri atas: a. BUM Desa; dan b. BUM Desa bersama. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama, sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama. Untuk perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUMDes/BUMDes bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDes/BUMDes bersama dan ditegaskan bahwa keputusan

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menepatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDes/BUMDes bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Pengaturan mengenai pendirian BUMDes/BUMDes bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur secara rigid didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah menghasilkan beberapa peraturan pelaksanaan diantaranya:

1. Sebagai tindak lanjut pendelegasian yang diberikan Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2. Sebagai tindak lanjut Ketentuan Lain-Lain Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
3. Sebagai tindak lanjut pedelegasian yang diberikan oleh Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

**B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang terkait dengan Penyusunan Norma.**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di dalam Pasal 5 mengamanahkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan (termasuk salah satunya Peraturan Daerah) harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Kemudian di Pasal 6 masih dalam juga diamanahkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas yang harus tercermin dalam materi muatan akan dijabarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

<b>PASAL 5 UU NOMOR 12 TAHUN 2011</b>		<b>PENJELASAN PASAL 5 UU NOMOR 12 TAHUN 2011</b>
<b>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:</b>		
1.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.	kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 4: Asas yang Harus Tercermin dalam Materi Muatan

<b>PASAL 6 UU NOMOR 12 TAHUN 2011</b>		<b>PENJELASAN PASAL 6 UU NOMOR 12 TAHUN 2011</b>
<b>Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas:</b>		
1.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

		Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10.	Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keserasian, dan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

	Keselarasan	mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
	<b>Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</b>	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Selain asas-asas sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib Penyelenggara Negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Terkait Desa, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diamanatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

1. Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Tertib Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Efektivitas dan Efisiensi;

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

9. Kearifan Lokal;

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

10. Keberagaman; dan

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

11. Partisipatif.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diamanatkan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUMDes/BUMDes bersama, pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

a. Profesional;

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai

b. Terbuka dan Bertanggung Jawab;

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUMDes dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUMDes mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

c. Partisipatif;

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUMDes baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

d. Prioritas Sumber Daya Lokal; dan

Yang dimaksud dengan "prioritas sumber daya lokal" adalah dalam menjalankan usahanya, BUMDes harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.

e. Berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUMDes diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Grobogan. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Grobogan.

**C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 2415 jumlah BUMDes di Kabupaten Grobogan, dengan berbagai jenis bidang usaha mulai dari jenis usaha isi ulang air minum, simpan pinjam, internet, pamsimas, sampai dengan penyewaan kios pasar.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal yang cukup krusial terkait dicabutnya BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah bahwa BUM Desa terdiri atas: a. BUM Desa; dan b. BUM Desa bersama. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUMDes bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasehat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUMDes/BUMDes bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah

Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menepatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDes/BUMDes bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Oleh sebab itu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa berisi pengaturan mengenai pendirian BUMDes/BUMDes bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDes bersama.

Hal krusial selanjutnya yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah BAB Ketentuan lain-lain Pasal 73 yang mengamanatkan bahwa:

1. Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. BUM Desa bersama ini disebut lembaga keuangan Desa.
2. Modal BUMDes bersama bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa. Modal masyarakat Desa tersebut berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri

perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

3. Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMDes/BUMDes bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa yang diatur dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi BUMDes bersama eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
4. BUM Desa bersama eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dapat membentuk Unit Usaha BUMDes bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keuntungan yang diperoleh dari BUMDes bersama eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang merupakan porsi pengelolaan aset- eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah terbit yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip:

1. kepemilikan bersama masyarakat;
2. partisipatif dan demokratis;
3. sederhana, berpihak, dan melindungi;
4. keterbukaan dan kemandirian;
5. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
6. terkendali dan seimbang; dan
7. berkelanjutan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama diamanatkan bahwa Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan:

1. pengalihan aset;
2. pengalihan kelembagaan;
3. pengalihan personil; dan
4. pengalihan kegiatan usaha.

Diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa:

1. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan

Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi badan hukum selain BUM Desa bersama yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama melalui mekanisme pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Pengajuan pembubaran badan hukum dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa mengenai kesepakatan pembubaran badan hukum dan persiapan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama yang dituangkan dalam berita acara.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa ini merupakan tindak lanjut dari perkembangan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berpotensi disharmonis terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas.

Dengan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa yang baru untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diharapkan dapat terbentuk BUMDes/ BUMDes bersama yang sesuai dengan perkembangan hukum yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan BUMDes/ BUMDes bersama yang terbentuk dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarrnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan

5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Disisi lain Implikasi pada Aspek Beban Keuangan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa adalah adanya *cost* berupa kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melakukan Pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama secara berjenjang, meliputi:

1. sosialisasi kebijakan;
2. fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
3. pelatihan;
4. bimbingan teknis; dan
5. pendataan dan identifikasi perkembangan.

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud diatas melalui organisasi perangkat daerah yaitu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, inspektorat kabupaten/kota, dan kecamatan. Dalam Pasal 23 ayat (5) juga diamanatkan bahwa Bupati menyusun laporan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDes bersama kepada gubernur.

Berdasarkan penjabaran diatas, walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan memerlukan *cost* untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud diatas namun benefit yang akan didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan lebih besar daripada *cost* yang

dikeluarkan, jika tujuan dari BUMDes/ BUMDes bersama terwujud, sehingga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa layak untuk dilanjutkan.

## BAB III

### ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif. Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,

---

<sup>23</sup> Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, PT. Bina Aksara. 1987. Hal. 98.

3. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas *delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Peraturan Daerah sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis yang dapat mempercepat realisasi program-program strategis pembangunan di daerah. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

· Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

· Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang relevan dikemukakan terkait dengan naskah ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan*

*Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.*

*Huruf d*

*Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.*

*Huruf e*

*Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

*Huruf f*

*Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.*

## *Huruf g*

*Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan berdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).*

### *Pasal 6*

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:*
  - a. pengayoman;*
  - b. kemanusiaan;*
  - c. kebangsaan;*
  - d. kekeluargaan;*
  - e. kenusantaraan;*
  - f. bhinneka tunggal ika;*
  - g. keadilan;*
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
  - h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
  - i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*Huruf d*

*Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.*

*Huruf e*

*Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

#### *Huruf f*

*Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

#### *Huruf g*

*Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.*

#### *Huruf h*

*Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.*

#### *Huruf i*

*Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.*

#### *Huruf j*

*Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.*

#### *Pasal 14*

*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan*

*otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*

### **3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

· Pasal 87

- (1) *Desa dapat mendirikan BUM Desa.*
- (2) *BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.*
- (3) *BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

· Pasal 88

- (1) *Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.*
- (2) *Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.*

Pasal 89

*Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:*

- a. *pengembangan usaha; dan*
- b. *Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*

Pasal 90

*Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:*

- a. *memberikan hibah dan/ atau akses permodalan;*
- b. *melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan*
- c. *memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.*

**4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236

- (1) *Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.*
- (2) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.*
- (3) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:*
  - a. *penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan*
  - b. *penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*
- (4) *Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 237

- (1) *Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (2) *Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.*
- (4) *Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.*

· Pasal 238

- (1) *Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- (3) *Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.*
- (5) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:*
  - a. *teguran lisan;*
  - b. *teguran tertulis;*
  - c. *penghentian sementara kegiatan;*
  - d. *penghentian tetap kegiatan;*
  - e. *pencabutan sementara izin;*
  - f. *pencabutan tetap izin;*
  - g. *denda administratif; dan/atau*
  - h. *sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

· Pasal 250

*Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.*

**5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

· Pasal 6

- (1) *Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan desa di wilayahnya.*

- (2) *Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.*

· *Pasal 33*

*Kewenangan Desa meliputi :*

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;*
- b. kewenangan lokal berskala Desa;*
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan*
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

· *Pasal 83*

- (1) *Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.*
- (2) *Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.*
- (3) *Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.*
- (4) *Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.*

· *Pasal 93*

- (1) *Pengelolaan keuangan Desa meliputi:*
  - a. perencanaan;*
  - b. pelaksanaan;*
  - c. penatausahaan;*
  - d. pelaporan; dan*
  - e. pertanggungjawaban.*
- (2) *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUMDes/BUMDes bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Selanjutnya untuk memberi gambaran mengenai materinya, berikut disajikan sistematika ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut:

Tabel 5 : Sistematika ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<b>BAB</b>	<b>Hal</b>	<b>Pasal</b>
1	KETENTUAN UMUM	1-6
2	PENDIRIAN BUMDES/ BUMDES BERSAMA	7-10
3	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	11-13
4	ORGANISASI & PEGAWAI BUMDES/BUMDES	14-36

	<p>BERSAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi BUMDes/BUMDes Bersama <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa</li> <li>- Penasihat</li> <li>- Pelaksana Operasional</li> <li>- Pengawas</li> </ul> </li> <li>2. Pegawai BUMDes/BUMDes Bersama</li> </ol>	
5	RENCANA PROGRAM KERJA	37-38
6	<p>KEPEMILIKAN, MODAL, ASET DAN PINJAMAN BUMDES/BUMDES BERSAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan</li> <li>2. Modal</li> <li>3. Aset</li> <li>4. Pinjaman</li> </ol>	39-48
7	UNIT USAHA BUMDES/BUMDES BERSAMA	49-52
8	PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA	53
9	KERJA SAMA	54-57
10	PERTANGGUNGJAWABAN	58-59
11	PEMBAGIAN HASIL USAHA	60
12	KERUGIAN	61-63
13	PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDES/BUMDES BERSAMA	64-69
14	PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI	70
15	<p>PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan Pemeringkatan BUMDes/BUMDes Bersama</li> <li>2. Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama</li> </ol>	71-72
16	KETENTUAN LAIN-LAIN	73-74

17	KETENTUAN PERALIHAN	75
18	KETENTUAN PENUTUP	76-78

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 7

- (1) BUMDes didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung, tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDes di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. penetapan pendirian BUMDes / BUMDes Bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes Bersama; dan
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDes/BUMDes bersama.

Pasal 10

Pendirian BUMDes/BUMDes bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan :

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;

- d. *model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan*
- e. *visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religius, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.*

*Pasal 11*

- (1) *Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.*
- (2) *Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :*
  - a. *nama;*
  - b. *tempat kedudukan;*
  - c. *maksud dan tujuan pendirian;*
  - d. *modal;*
  - e. *jenis usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum;*
  - f. *nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;*
  - g. *hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas; dan*
  - e. *ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.*
- (3) *Perubahan Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
- (4) *Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama.*
- (5) *Dalam hal BUMDes/BUMDes bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama harus memuat Unit Usaha BUMDes/BUMDes bersama.*

· Pasal 15

*Perangkat Organisasi BUMDes/BUMDes bersama terdiri atas :*

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;*
- b. penasihat;*
- c. pelaksana operasional; dan*
- d. pengawas.*

· Pasal 34

- (1) *Pegawai BUMDes/BUMDes bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.*
- (2) *Pegawai BUMDes/BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. Sekretaris;*
  - b. Bendahara; dan*
  - c. Pegawai lainnya.*
- (3) *Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.*
- (4) *Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui musyawarah desa/musyawarah antar desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.*
- (5) *Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.*

· Pasal 38

*Rencana program kerja BUMDes/BUMDes bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:*

- a. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan BUMDes/BUMDes bersama;*
- b. Anggaran BUMDes/BUMDes bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan*

*Hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah Desa/musyawarah antar desa.*

· **Pasal 39**

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDes/ BUMDes bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.*
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMDes/ BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMD Desa/ BUM Desa bersama.*

· **Pasal 49**

- (1) BUMDes/ BUMDes bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMDes/ BUMDes bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam hal unit usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta hubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDes/ BUMDes bersama.*
- (3) BUMDes/ BUMDes bersama dapat memiliki modal di luar unit usaha BUMDes/ BUMDes bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.*

· **Pasal 53**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDes/ BUMDes bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan profesionalitas.*
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDes/ BUMDes bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat.*
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa pada BUMDes/ BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 64

(1) *Penghentian kegiatan Usaha BUMDes/BUMDes bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDes/BUMDes bersama termasuk seluruh Usaha BUMDes/BUMDes bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.*

(2) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;*
- b. mencemarkan lingkungan;*
- c. dinyatakan pailit; dan*
- d. sebab lain yang sah.*

Pasal 72 ayat (3)

(3) *Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau bupati/walikota.*

Pasal 73 ayat (1)

(1) *Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.*

**7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya untuk memberi gambaran mengenai materinya, berikut disajikan sistematika ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut:

Tabel 6 : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

No	Hal	Pasal
1	PENDIRIAN BUM DESA	2-6
2	PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDES <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk Organisasi BUM Desa;</li> <li>- Organisasi Pengelola BUM Desa;</li> <li>- Modal BUMDes;</li> <li>- Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes;</li> <li>- Alokasi Hasil Usaha BUM Desa;</li> <li>- Kepailitan BUMDes;</li> <li>- Kerjasama BUMDes Antar-Desa;</li> <li>- Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes</li> </ul>	7-31
3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	32
4	KETENTUAN PERALIHAN	33
5	KETENTUAN PENUTUP	34-35

**8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Beberapa ketentuan dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

· Pasal 2

- (1) *Pendaftaran nama BUMDes/ BUMDes bersama dilakukan oleh pemohon melalui sistem informasi Desa.*
- (2) *Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *Kepala desa untuk BUMDes; atau*
  - b. *Kepala desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUMDes bersama.*
- (3) *Pendaftaran nama BUMDes/ BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan musyawarah desa/ musyawarah antar desa mengenai pendirian BUMDes/ BUMDes bersama.*

· Pasal 8

- (1) *Pendaftaran BUMDes/ BUMDes bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
- (2) *Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:*
  - a. *Kepala Desa untuk BUMDes; atau*
  - b. *Kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUMDes bersama.*

· Pasal 15

*Pemutakhiran data BUMDes/ BUMDes bersama dilakukan dalam hal terdapat:*

- a. *Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar;*
- b. *Pelaporan penghentian kegiatan usaha; atau*
- c. *Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.*

· Pasal 28

*Pengadaan barang dan/ atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUMDes/ BUMDes bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:*

- a. *Penyertaan modal Desa;*
- b. *Penyertaan modal masyarakat Desa;*
- c. *Hasil atau laba usaha;*
- d. *Pinjaman; dan*
- e. *Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.**

Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang menjadi BUM Desa bersama. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 2

*Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip:*

- a. *Kepemilikan bersama masyarakat;*
- b. *Partisipatif dan demokratis;*
- c. *Sederhana, berpihak dan melindungi;*
- d. *Keterbukaan dan kemandirian;*
- e. *Kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;*
- f. *Terkendali dan seimbang; dan*
- g. *berkelanjutan.*

Pasal 4

- (1) *Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama.*

- (2) *Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:*
  - a. *pengalihan aset;*
  - b. *pengalihan kelembagaan;*
  - c. *pengalihan personil; dan*
  - d. *pengalihan kegiatan usaha.*
- (3) *Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam musyawarah antar Desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUMDes bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.*
- (4) *Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan terhadap pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.*
- (5) *Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.*
- (6) *Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

#### **Pasal 25**

*Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan:*

- a. *Forum koordinasi pimpinan daerah; dan*
- b. *Tenaga pendamping profesional yang bertugas di provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, dan Desa setempat.*

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Menurut Jimly Asshiddiqie, tiga (3) hal dalam pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, dan selain aspek politis<sup>24</sup>. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan hasil data riset yang akurat terkait materi muatan. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>25</sup>.

Oleh karena untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya riset atau kajian akademik dalam bentuk Naskah Akademik. Peraturan daerah yang baik harus disusun berdasarkan tiga landasan meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis. Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa ini terdapat 3 (tiga) landasan sebagai berikut :

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Nilai filosofis Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai landasan ideologi dan sumber hukum tertinggi dalam negara, dinyatakan secara eksplisit dan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta. 2006. Hal 58.

<sup>25</sup> Hamidi .2005.*Metode Penelitian Kualitatif*. Malang:UMM press. Hal 10.

dicantumkan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Badan Usaha Milik Desa ini.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat adalah: Usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menerapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini kemudian tujuan nasional yang tercantum dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud implementasi dari tujuan nasional tersebut yaitu dengan adanya otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi-regulasi sesuai dengan wewenangnya. Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi yang ada

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara filosofis penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pembangunan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Akan terjadi peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat. Undang-undang yang mengatur khusus mengatur tentang desa telah disahkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. Undang-Undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, Undang-undang Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri, dan berimplikasi pula pada kesejahteraan desa secara umum, sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes merupakan salah satu pilar dalam pengembangan masyarakat di Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kesejahteraan Desa sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan<sup>26</sup>. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari

---

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co. 1992, Hal 17.

sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkret dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka menggerakkan ekonomi, pengembangan potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Keberadaan BUMDes di Kabupaten Grobogan memiliki peran dan andil dalam pemerintahan desa, yaitu:

- 1) membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sehingga kualitas hidup masyarakat desa lebih baik;
- 2) membantu dalam pengembangan SDM sehingga membantu dalam pengelolaan aset BUMDes; dan
- 3) memberikan ruang gerak pada masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh perbankan (Khususnya para pelaku UMKM).

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan Daerah Kabupaten Grobogan yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

BUMDes dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha

Milik Desa, namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, para ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.

### **C. Landasan Yuridis**

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) Kebutuhan masyarakat (*Social Need*); 2) kondisi masyarakat (*Social Condition*); 3) Modal/kekayaan masyarakat (*Social*

*Capital*)<sup>27</sup>. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun pedoman pengaturan kebijakan pemerintah, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena terhadap peraturan yang hendak dibuat sebagai pedoman hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Upaya Pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan

---

<sup>27</sup> Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. Hal. 145.

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUM Desa adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pelopor dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

Pasal 87 mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes;

Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes;

Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes;

Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Walaupun sebelumnya juga keluar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, namun di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menyinggung mengenai BUMDes secara terperinci. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan tetapi dalam menghadapi tantangan global dan persaingan perekonomian yang dinamis maka kedudukan BUMDes/BUMDes bersama lebih ditekankan dan dipertegas sebagai entitas hukum yang diakui negara melalui pemberian status badan hukum yang diakomodir melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar di dalam BUMDes serta pengakuan BUM Desa sebagai entitas hukum melalui pemberian status badan hukum suatu organisasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Pasal 132 sampai dengan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi kemudian dalam perkembangan Peraturan Daerah ini dianggap tidak lagi relevan dengan peraturan terkait BUMDes terutama setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang dalam Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah ini mencabut Bab VIII tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyikapi adanya dinamika peraturan perundang-undangan tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebuah Peraturan Daerah terbaru tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Daerah tentang BUMDes ini nantinya diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dinamika tentang BUM Desa, kebutuhan serta status hukum bagi BUMDes dan BUMDes bersama dan transformasi pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI**

#### **MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. Sasaran**

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian desa dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa.

##### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa mencoba untuk mempertegas peran dan fungsi dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Kedepannya yang coba kita bangun adalah bagaimana melalui Peraturan Daerah ini aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui aturan tentang Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

##### **C. Ruang Lingkup Muatan Materi Peraturan Daerah**

###### **Ketentuan Umum**

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah, berisi tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum berisi istilah yang digunakan dalam perda tentang BUMDes yaitu: Daerah; Pemerintah Daerah; Kepala Daerah; Kecamatan; Camat; Desa; Pemerintahan Desa; Pemerintah Desa; Kepala Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa; Kekayaan Desa; Badan Usaha Milik Desa; Permodalan BUMDes; Wilayah kerja BUMDes dan Transformasi pengelola kegiatan Eks DBM PNPM-MPd.

#### 1. Ketentuan Umum

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.
3. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa.
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## 2. Konsiderans

- a. bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilar dalam pengembangan masyarakat berperan mewujudkan kesejahteraan Desa sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa dalam rangka memajukan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, menuntut adanya penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa melalui kebijakan yang sistematis, terukur, dan terarah guna mewujudkan perencanaan pembangunan perekonomian Desa secara berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga harus diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

### 3. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Materi Pengaturan

Materi yang hendaknya akan diatur dalam Perda tentang BUMDes yaitu:

- a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUM Desa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. BUM Desa ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUM Desa didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat: maksud dan tujuan; nama tempat dan kedudukan wilayah usaha; asas, fungsi dan jenis usaha; permodalan; kepengurusan dan organisasi; kewajiban dan hak; penetapan dan penggunaan laba. BUM Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat.

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Organisasi BUM Desa adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perorangan. Secara organisatoris struktur BUM Desa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa. BUM Desa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan. Anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada bupati melalui camat.

c. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

Kepengurusan BUM Desa Pengurus BUM Desa terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat oleh kepala desa. Pelaksana operasional terdiri atas manajer dan kepala unit usaha. Masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa adalah 5 (lima) tahun. Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD. Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUM Desa Persyaratan pengangkatan, berhenti, dan atau diberhentikannya pelaksana operasional BUM Desa.

d. Rencana Program Kerja

Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa / BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

e. Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa / BUM Desa Bersama  
Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa / BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa. Modal berasal dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

f. Unit Usaha BUM Desa / BUM Desa Bersama

BUM Desa / BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa / BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan. perundang-undangan

g. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa / BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.

h. Kerja Sama

Bab ini mengatur bahwa BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya dan/atau dengan pihak ketiga. Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam menjalin kerjasama antar BUM Desa dan/atau dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa.

i. Pertanggungjawaban

Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa / BUM Desa Bersama.

j. Pembagian Hasil Usaha

Hasil Usaha BUM Desa / BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

k. Kerugian

Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas. Dalam hal hasil pemeriksaan/audit menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/ BUM Desa bersama.

l. Penghentian Kegiatan Usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama

Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.

m. Perpajakan Dan Retribusi

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama. Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.

o. Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama secara berjenjang

p. Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan ini mengatur mengenai kewajiban pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. Ketentuan Peralihan

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, dimana BUMDes/BUMDes bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

r. Ketentuan Penutup

Mencabut status Peraturan Daerah yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1). Dan mengatur terkait masa berlaku Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terkait Badan Usaha Milik Desa adalah adanya perkembangan hukum yang ada dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang dalam Pasal 76 mencabut BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakibatkan mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan hukum yang ada, selain telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana disebutkan pada angka 1, juga telah terbit beberapa peraturan pelaksanaannya diantaranya: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

3. Landasan filosofis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa adalah bahwa BUMDes merupakan salah satu pilar dalam pengembangan masyarakat di Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kesejahteraan Desa sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian landasan sosiologis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa adalah dalam rangka menggerakkan ekonomi, pengembangan potensi ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan landasan yuridis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengakomodir perkembangan, kebutuhan serta status hukum bagi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama dan transformasi pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa terdiri atas pengaturan mengenai Pendirian BUMDes/BUMDes Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi Dan Pegawai BUMDes/BUMDes Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset, Dan Pinjaman BUMDes/BUMDes Bersama, Unit Usaha BUMDes/BUMDes

Bersama, Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Kerja sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha Penghentian Kegiatan Usaha BUMDes/BUMDes Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan dan Pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama, Ketentuan Lain-Lain yang mengamanatkan terkait Pengelola kegiatan dan bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan serta Ketentuan Peralihan yang mengamanatkan BUMDes/BUMDes Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa yang mencabut serta menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar dapat menjawab permasalahan Badan Usaha Milik Desa di Grobogan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

### Buku :

Abdulhay, Marhainis. Hukum Perdata Material – Jilid I. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982.

Ali, Chidir. Badan Hukum., Loc. Cit. Sebagaimana dikutip dari Rochmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan, Eresco, Jakarta, Bandung, 1979.

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta. 2006.

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, Ind Hill Co. 1992.

Chidir Ali, Badan Hukum. Loc. Cit. Sebagaimana dikutip dari Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi), CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Eko,Sutoro Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.

Hamidi. 2005.Metode Penelitian Kualitatif. Malang:UMM press.

Ihsan, Moch Musoffa Ketahanan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.

Irawati, Erni Jurnal Inovasi Penelitian Volume 2 Nomor 2 Juli Tahun 2021, Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa).

Kurnia, Mahendra Putra dkk. Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Kusuma Dewi, Amelia Sri Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Journal of Rural and Development, Volume V No. 1 Februari 2014.

M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakart:2015.

Prodjodikoro, Wirjono. Azas-Azas Hukum Perdata. Bale Bandung – Sumur Bandung. 1987. Sebagaimana dikutip dari Sri Soedewi. M. Sofwan. Hukum Badan Pribadi. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, stencil tanpa tahun.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Intermasa, Jakarta, 1985.

Syarif, Aminoedin. Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta, PT. Bina Aksara. 1987.

### Jurnal :

Baharudin, Pengertian Desa, Jurnal desa.id dalam <https://jurnaldesa.id/pengertian-desa/>.